PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HIDAYAT**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **665595**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 4.695.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 326 m2/80 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. Tanah Seluas 255 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/323 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 4.000.000.000
5. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 308.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU PICK UP Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA V Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. MOTOR, ASTREA STAR C86 Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA NF125 TR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

6. MOTOR, HONDA NF125 D Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
7. MOTOR, HONDA NF 100 SE Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
8. MOTOR, HONDA NC11B3C Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**----**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**18.511.158**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**5.022.011.158**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**1.598.740.285**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**3.423.270.873**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.